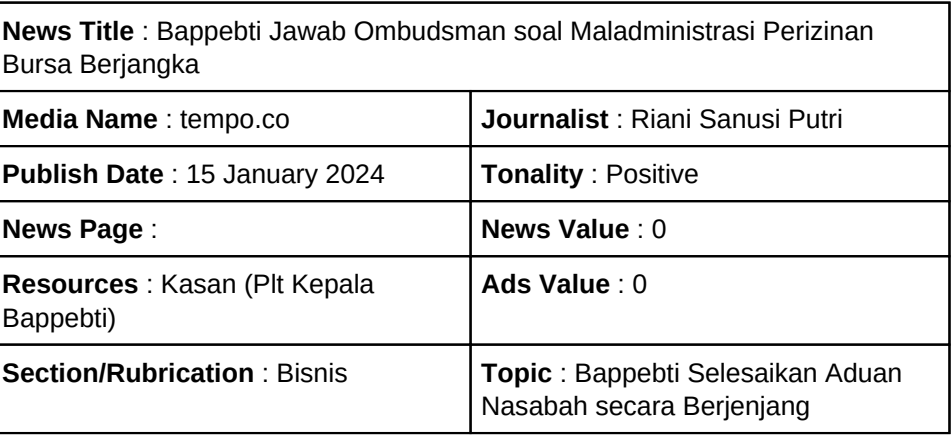




Terbaru

Tips

Femina

News

Multimedia

Selisi

Gaya Hidup

[Beranda](#) > [Bisnis](#)

Bappebti Jawab Ombudsman soal Maladministrasi Perizinan Bursa Berjangka

Penerbit
Rianaldi Maulana Purnomo Editor
Alding Setijono

Semb, 19 Januari 2024 10:00 WIB

Anggota Ombudsman RI, Nela Herika Fatmahan melakukan pemeriksaan ke Kantor Ombudsman mengenai "Maladministrasi Bappebti RI," berdasarkan surat pengaduan melalui forum diskusi "Pemeriksaan Tindak Pengawasan dan Penegakan Berjangka Komoditi" di Gedung Ombudsman RI pada Jawa, 1 Desember 2023. TSP/Infotikus/Media Jember

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons soal maladministrasi dalam proses perizinan bursa berjangka yang dikemukakan oleh Ombudsman RI. Bappebti mengatakan telah menangani aduan dan menyelesaikan permasalahan secara berjenjang.

"Bappebti menanggapi aduan dan permasalahan pengadilan secara berjenjang. Artinya, Bappebti tidak pernah diam dalam melindungi nasabah," ujar PT. Kepala Bappebti Kasan dalam keterangan Ahmad Masduki, 14 Juni 2024.

Baca juga:

Dinilai Tak Decus Urus Laporan Korban Pialang, Ini Tanggapan Bappebti

Sebelumnya, Ombudsman dengan menyertai 15 laporan korban penurusan pialang. Adapun nilai kerugian senilai Rp 8 miliar. Dari 15 orang pelapor, ada tiga nama perusahaan pialang yang disebut, yaitu PT Midtuo Araycom Futures, PT Bestprofit Futures, dan PT Rifan Finansindo Berjangka. Padahal, ketiga perusahaan pialang tersebut adalah h++ oleh Bappebti yang berarti baik.

Kasan menjelaskan kasus administratif yang berkenaan Bappebti merupakan hasil proses akhir atas pemeriksaan tim Bappebti. Khususnya terhadap penanganan pengaduan aksi pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif.

Menyebutnya, seluruh proses pemeriksaan, klarifikasi, dan pemenuhan saksu pun telah dilakukan sesuai prosedur. Antara lain sesuai dalam peraturan perundang undangan di bidang perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Baca juga:

Asik Kripto akan Diawasi OJK Awal Tahun 2025

Hali itu berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Berikutnya, diatur lebih lanjut melalui Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelidikan Perselisihan Nasabah di bidang PBK.

Ithwal permintaan pengambilan data atau ganti rugi kepada Bappebti, mengatakan telah disediakan jalur penyelesaian keluhan perizinan nagen atau persoalan arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (BAKTI) sesuai peraturan perundang undangan di bidang PBK.

Proses tersebut, ujar Kasan, sesuai pilhan penyelesaian perselisihan hukum yang tarcantum dalam dokumen pelayanan pemberian amanat nasabah. Lebih lanjut, Bappebti menyatakan akan mengoptimalkan penanganan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat.

◀ SIKOL UNTAH MARIKUN ▶

Dalam strategi pengembangan itu, Kasan berharap Bappebti melakukan berbagai langkah antara lain melalui peningkatan regulasi dan literasi, integrasi sistem aplikasi, dan penerapan sistem rating di bidang Berjangka. Berikutnya, penyelesaian perselisihan pengadilan dan tuntutan kerja sama seperti dengan Kejaksaan Agung RI.

Adapun Bappebti juga merupakan anggota yang aktif dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas KeuanganIllegal Satgas PASTI, Di forum internasional, Indonesia menjadi anggota United Financial Action Task Forces (FATF) pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam di Paris, Prancis. Menurut Kasan, keunggulan tersebut menunjukkan peran aktif Bappebti dalam memengaruhi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selama 2023, ia mencatat Bappebti menerima 177 pengaduan nasabah terhadap perusahaan pialang berjangka. Dari sejumlah aduan tersebut, 82 pengaduan nasabah telah selesai ditangani Bappebti sedangkan 95 kasus pengaduan masih dalam proses penyelesaian.

Dalam beberapa jumlah aduan, menurut Kasan, hal terpenting yang dinilai Bappebti adalah pengajuan regulasi dan literasi serta optimisasi implementasi terdistribusi Lembaga Sertifikasi Profesi PBK (LSP-PBK), LSP PBK didirikan berdasarkan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) No. Kep. 204-B/BNSP/IX/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Lisensi LSP-PBK.

Saat ini, telah terdapat 48 asesor yang memiliki sertifikasi LSP-PBK dari BNSP.

Dalam waktu dekat, LSP-PBK akan melaksanakan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang PBK untuk Wakil Pialang Berjangka (WPB) dan Wakil Perantara Berjangka (WAPB) melalui ujian kompetensi dan memberikan Tanda Uluas Uji Protesi (TUPU). Untuk menjadi WPB atau WAPB, ia menjelaskan pengalaman TUPU harus mengukuti unti kepada Bappebti untuk dinilai kembali kelayakannya.

Melalui skema bertahap ini, Bappebti berharap SDM di bidang PBK akan lebih kompeten sesuai dengan bidang keahlian, baik sebagai WPB maupun WAPB. Sehingga, hal ini akan mempengaruhi penurunan aduan nasabah di bidang PBK. Bappebti juga menyatakan akan memperkuat pengembangan berbasis teknologi informasi dan SDM bersama para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja PBK.

Pilihan Editor: Gajih Berjangka Kasus Wada dan Semen Rembang Dibahas di Debat Calon Presiden

Berita Selanjutnya

RPS Cetak Ekspor Desember 2023 Capex US\$ 22,41 Miliar, Angkita hingga 5,9% Perahu
2.2000110